**RENCANA STRATEGI**

**TAHUN 2014 - 2018**

**C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0233018.wmf**

**KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL**

**KABUPATEN TEMANGGUNG**

**TAHUN 2014**

**KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas diberi kesempatan dan kemudahan kepada kami dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Moda (KP3M) Kabupaten Temanggung untukm periode 5 (lima) tahun kedepan. Dengan Renstra ini akan mempermudah bagi kami dalam menentukan arah kebijakan yang menunjang keberhasilan dari target kinerja kami melalui perumusan rencana strategis guna menunjang Visi Misi Daerah Kabupaten Temanggung, khususnya dalam memberikan kontribusi atas pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan laju investasi daerah, karena melalui sektor ini akan dapat memberikan efek ganda pada aktifitas sektor-sektor lain, dan untuk mendukung cita-cita tersebut maka Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung siap memberikan pelayanan prima baik dalam pelayanan perizinan maupun non perizinan.

Kami sepenuhnya menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih jauh dari sempurna, maka dari itu saran yang positif demi terwujudnya tujuan utama dari pencapaian Visi Misi Daerah Kabupaten Temanggung dan khususnya melalui Visi Misi kantor pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung akan kami terima dengan terbuka dan senang hati.

Akhirnya kami berharap semoga Renstra ini dapat berguna dan bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 10 Maret 2014

KEPALA KANTOR

PELAYANAN PERIZINAN DAN

PENANAMAN MODAL

KABUPATEN TEMANGGUNG

Dra.WARA ANDIJANI,M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19611029 1999902 001

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

BAB I PENDAHULUAN 6

1.1 Latar Belakang 6

1.2. Landasan Hukum 7 1.3 Maksud dan tujuan 8

1.4 Hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya 9

1.5 Sistematika penulisan 10

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KP3M 12

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi KP3M 12

2.2 Sumber daya KP3M 16

2.3 Kinerja pelayanan KP3M 18

2.4 Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan KP3M 24

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 27

3.1 Indentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan KP3M 27

3.2 Telaah Visi, Misi dan program Bupati Temanggung 31

3.3 Telaah Struktur Ruang Wilayah 34

3.4 Penentuan Isu-isu strategis 36

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 37

4.1 Visi dan Misi KP3M 37

4.2 Tujuan dan sasaran jangka menengah KP3M 37

4.3 Strategi dan Kebijakan 41

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 44

BAB VI INDIKATOR KINERJA KP3M 57

BAB VII PENUTUP 59

LAMPIRAN- LAMPIRAN :

Lampiran I Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif KP3M ( 2013 – 2018 ) 60

Lampiran II BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM KP3M PENYUSUNAN RENSTRA KP3M 72

Lampiran III BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM

KP3M 73

Lampiran IV BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN

FORUM SKPD 74

Lampiran V BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN

FORUM KOMUNIKASI KP3M 77

**DAFTAR TABEL DAN DAFTAR GAMBAR**

**BAB I**

**P E N D A H U L U A N**

* 1. **LATAR BELAKANG**

Pembangunan ekonomi salah satunya melalui kemudahan dalam usaha, namun kemudahan dalam usahapun tidak serta merta membuat ekonomi menjadi tumbuh karena faktor birokrasi ditingkat pusat maupun daerah masih belum sepakat dengan adanya arti sebenarnya dengan pertumbuhan ekonomi sendiri, yang justru sebetulnya diberikan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, jika aturan maupun kebijakan yang dibuat malah memberatkan rakyat dalam hal ini adalah yang dimaksud dengan dunia usaha, justru akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Praktik ekonomi biaya tinggi ini biasanya disebabkan oleh diantaranya pungutan liar dan birokrasi yang panjang. Dari sisi dunia usaha, izin yang mereka dapatkan merupakan dasar atau legalisasi dari usaha yang mereka jalankan sehingga mereka dapat aman dan nyaman melaksanakan dan mengembangkan usaha yang mereka punya. Namun pelayanan perizinan yang sudah berjalan selama ini tidak selamanya menuai sambutan positif dari masyarakat, kerap sekali perijinan menjadi momok yang menakutkan bagi pengusaha atau investor. Di dalam pasal 25 ayat (4) dan (5) UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dijelaskan bahwa izin terhadap perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu. Sedangkan dalam pasal 26 ayat (1) dikatakan bahwa pelayanan satu pintu dimaksud bertujuan untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi terpadu berkaitan investasi yang semuanya nanti berujung pada kepastian hukum dan iklim investasi yang membaik, bukannya memburuk. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung sebagai salah satu faktor penggerak ekonomi daerah melalui pelayanan perizinan dan investasi berupaya semaksimal mungkin dan terus menerus membenahi diri guna perbaikan birokrasi baik evaluasi kinerja aparatur personilnya maupun kebijakan dan peraturan dibidang perizinan dan investasi agar ekonomi yang tumbuh di daerah tidak akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi.Karena Perizinan selain sebagai penggerak perekonomian di daerah juga berfungsi sebagai pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha serta sebagai salah satu kontributor atas kas daerah.

**1.2 LANDASAN HUKUM**

1. Undang undang NO.25 tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang undang NO.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah
3. Undang undang NO.17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
4. Peraturan Pemerintah NO.38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Pemerintah NO.8 tahun 2008 tentang ,tahapan,tata cara penyusunan,pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung NO. 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung NO.16 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Bappeda,Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung.
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018.

**1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Strategis Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (KP3M) Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018 di susun dengan maksud :

- Sebagai pedoman perencanaan dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan KP3M untuk periode 5 (lima) tahun kedepan

- Memberikan gambaran pelayanan yang dapat diberikan oleh KP3M hingga 5 (lima) tahun kedepan

- Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk pencapaian organisasi

Rencana Strategis Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (KP3M) Kabupaten Temanggung Tahun 2014 - 2018 disusun dengan tujuan :

- Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung dengan Renstra KP3M dalam menciptakan visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai tugas pokok dan fungsi KP3M.

- Untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, karena pola-pola pelayanan yang perlu diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat

- Untuk meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar unit kerja sehingga mendorong proses pengambilan keputusan dalam pencapaian tujuan organisasi

**1.4 HUBUNGAN RENSTRA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA**

Untuk mewujudkan suatu dokumen perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan yang utuh dengan sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintahh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Rencana Strategis KP3M Kabupaten Temanggung Tahun 2014 - 2018 di susun dengan memperhatikan dan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018.

Disamping itu penyusunan Renstra KP3M juga memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW ) Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2013, terutama dari sisi pola dan Struktur tata ruang, sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten Temanggung.

**1.5. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Renstra KP3M Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018 terdiri dari 7 ( tujuh ) bab. Secara garis bersar sebagai berikut :

**Bab I. Pendahuluan**

Bagian ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya serta maksud dan tujuan.

**Bab II. Gambaran pelayanan KP3M**

Bagian ini memaparkan Tugas, Fungsi dan struktur organisasi KP3M, Sumber daya KP3M, Kinerja pelayanan KP3M, Tantangan dan Peluang pengembangan Pelayanan KP3M.

**Bab III. Isu – isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Bagian ini memaparkan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan KP3M, Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati Temanggung,Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Penentuan Isu-isu Strategis.

**Bab IV. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Bagian ini menjelaskan Visi dan Misi KP3M tahun 2014 - 2018 yang merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih. Pada bagian ini juga diuraikan tujuan dan sasaran jangka panjang menengah KP3M, strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta kebijakan dari setiap strategi terpilih.

**Bab V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Bagian ini memaparkan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran KP3M Kabupaten Temanggung Tahun 2014 - 2018. Pada bagian ini, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja program pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan beserta kebutuhan pendanaannya.

**Bab VI. Indikator Kinerja**

Bagian ini menguraikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi KP3M pada akhir periode masa jabatan Kepala Daerah terpilih, dengan menggambarkan akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah atau indikator capaian yang bersifat mandiri sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai

**Bab VII. Penutup**

Bagian ini menjelaskan dengan singkat definisi, fungsi, dan peran dari dokumen Renstra yang telah ditetapkan

**BAB II**

**GAMBARAN PELAYANAN KP3M**

**2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KP3M**

Struktur Organisasi pada Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung, yang secara lengkap disajikan dalam Bagan Organisasi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok dan Fungsi tiap personil adalah sebagai berikut :
   1. Kepala Kantor

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, maka fungsi dari Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten temanggung mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan umum dan teknis penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan
2. Pembinaan umum dan teknis pelayanan perizinan dan non perizinan
3. Penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan
4. Pelaksanaan teknis perhitungan, penetapan dan pemungutan retribusi perizinan dan non perizinan
5. Pengoordinasian pengaduan pelayanan perizinan dan non perizinan
6. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas dibidang pengkajian potensi, informasi dan promosi, fasilitasi dan kerjasama serta pengamanan investasi
7. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas tugas pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal
8. Penyelenggaraan tata usaha kantor
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya
   1. Kepala Sub Bag Tata Usaha

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kantor meliputi penyusunan program, administrasi keuangan, pelayanan administrasi umum dan administrasi kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

1. Pengelolaan urusan perencanaan dan pelaporan program
2. Penyusunan, pengolahan dan pelayanan data
3. Pengelolaan urusan keuangan
4. Pengelolaan urusan umum dan kepagawaian
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor
   1. Kepala Seksi Pelayanan dan Verifikasi

Kepala Seksi Pelayanan dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala kantor dibidang pelayanan dan verifikasi.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Pelayanan dan Verifikasi mempunyai tugas :

1. Pemberian informasi tentang penyelenggaraan perizinan dan non perizinan
2. Pelaksanaan pelayanan administrasi umum perizinan dan non perizinan
3. Pelaksanaan koordinasi verifikasi administrasi dan/atau verifikasi lapangan
4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor
5. Pelaksanaan penyuluhan pelayanan perizinan dan non perizinan
   1. Kepala Seksi Penetapan, Penerbitan dan Pengaduan Perizinan

Kepala Seksi Penetapan, Penerbitan dan Pengaduan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Kantor dibidang pemberian dan penetapan perizinan dan non perizinan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi ini mempunyai fungsi :

1. Penetapan perizinan dan non perizinan
2. Pelaksanaan koordinasi perhitungan dan penetapan biaya perizinan dan non perizinan
3. Pelaksanaan penerbitan perizinan dan non perizinan
4. Pelaksanaan administrasi pemungutan dan penyetoran retribusi perizinan dan non perizinan
5. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian pengaduan perizinan dan non perizinan
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Penetapan Kepala Kantor
   1. Kepala Seksi Pengembangan Penanaman Modal

Kepala Seksi Pengembangan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Kantor dibidang penanaman modal.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi ini mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan dan pengoordinasian dalam penyusunan rencana kerja dibidang pengkajian potensi dan informasi penanaman modal, promosi dan kerjasaman penanaman modal baik dalam dan luar negeri
2. Penyiapan bahan penetapan bidang usaha unggulan atau prioritas sesuai dengan potensi dan daya dukung daerah dalam bentuk daftar bidang-bidang unggulan dan prioritas
3. Penyiapan bahan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pengembangan kerjasama penanaman modal
4. Penginventarisasian permasalahan yang berhubungan dengan penyusunan rencana kerja penelitian, pengkajian dan pelaksanaan promosi, kerjasama dan pengamanan penanaman modal
5. Penginventarisasian, penelitian, pengkajian data dan potensi penanaman modal baik dalam negeri maupun luar negeri serta penyajian hasilnya
6. Pengidentifikasian potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, daftar pengusaha kecil, menengah dan besar
7. Penyusunan profil penanaman modal daerah
8. Pengoordinasian dan pengendalian iklim penanaman modal yang kondusif
9. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi intern dan antar unit terkait dibidang kerjasama penanaman modal
10. Pelaksanaan kegiatan pemberian informasi/ penyuluhan dibidang penanaman modal
11. Pelaksanaan fasilitasi dan pengembangan pengelolaan sarana dan prasarana penanaman modal
12. Pelaksanaan pelayanan administrasi umum pelayanan penanaman modal, kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan promosi penanaman modal
13. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penanaman modal
14. Opelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor

Untuk lebih jelas dari susunan organisasi dapat dilihat struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan dan penanaman Modal Kabupaten Temanggung

Gambar struktur organisasi KP3M

**2.2 SUMBER DAYA KP3M**

Sumber daya KP3M Kabupaten Temanggung dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi KP3M meliputi data sumber daya manusia dan aset barang / gedung yang dimiliki KP3M Kabupaten Temanggung.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah kepegawaian/SDM Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung sebanyak 18 orang dengan perincian :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Golongan  Pendidikan | Gol I | Gol II | Gol III | Gol IV | Jml |
| SD | 1 | - | - | - | 1 |
| SLTP | - | - | - | - |  |
| SLTA | - | 2 | - | - | 2 |
| D3 |  | 4 |  |  | 4 |
| S.1 | - |  | 10 | - | 10 |
| S.2 | - | - | - | 1 | 1 |
| S.3 | - | - | - | - | - |
| Jumlah | 1 | 7 | 10 | 1 | 18 |

2.2.2 Sumber Daya Selain Manusia

Berikut ini tabel sumber daya selain manusia di KP3M

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | JENIS SARPRAS | JML | SATUAN | KET |
| 1 | Gedung | 1 | Unit | Baik |
| 2 | Pelengkapan Komputer |  |  | Kondisi Rusak Berat :   * Kamera digital * Papan data * Printer Epson * 2 Netbook |
|  | 1. Komputer | 15 | Unit |
|  | 1. Laptop | 1 | Unit |
|  | 1. Netbook | 2 | Unit |
|  | 1. Printer | 11 | Unit |
| 3 | Kendaraan Dinas | 5 | Unit |
| 4 | Alat Rumah Tangga | 5 | Unit |
| 5 | Mebelair | 92 | Unit |
| 6 | Barang elektronik | 7 | Unit |
| 7 | Perlengkapan kantor | 105 | Unit |

**2.3 KINERJA PELAYANAN KP3M**

Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung dibentuk berdasarkan Peraturan daerah Nomor 22 tahun 2011 tentang Struktur Organisasi lembaga Teknis Daerah. Pelayanan perizinan pada KP3M adalah pelayanan administrasi baik pelayanan pemberian perizinan baru, perubahan izin, perpanjangan/ her-registrasi/ daftar ulang perizinan dan pemberian salinan perizinan. Berikut Izin-izin yang dilayani oleh KP3M, yaitu :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Izin Lokasi | 12 | SIUJK | 23 | Izin Penyelenggaraan Apotek |
| 2 | HO | 13 | IUA | 24 | Pendaftaran Penanaman Modal |
| 3 | IMB | 14 | IT | 25 | Izin Prinsip Penanaman Modal |
| 4 | SIUP | 15 | Izin Pengendalian Menara | 26 | Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal |
| 5 | TDP | 16 | Izin Usaha Peternakan | 27 | Izin Prinsip Perubahan penanaman Modal |
| 6 | TDG | 17 | Tanda Daftar Usaha Peternakan | 28 | Izin Usaha Penanaman Modal |
| 7 | TDI | 18 | Izin Usaha Obat Hewan | 29 | Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal |
| 8 | Izin Prinsip | 19 | Izin Pendirian Rumah sakit | 30 | Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal |
| 9 | IUI | 20 | Izin Balai Pengobatan | 31 | Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal |
| 10 | IPI | 21 | Izin Rumah Bersalin | 32 | Tanda daftar Usaha Pariwisata |
| 11 | IUIPHHK | 22 | Izin Penyelenggaraan Toko Obat |  |  |

Selain itu sebagai bagian dari penyelenggaraan pelayanan, dilaksanakan sistem pelaksanaan kepuasan konsumen melalui sistem penanganan pengaduan dan pelaksanaan survey kepuasan konsumen. Bentuk-bentuk saluran pengaduan yang disediakan yaitu :

1. Pengaduan langsung, yaitu pengaduan yang disampaikan secara langsung kepada petugas pengaduan
2. Pengaduan tidak langsung, yaitu melalui pengaduan tertulis yang disampaikan melalui surat

Sedangkan pelaksanaan survey kepuasan konsumen di KP3M disampaikan secara langsung kepada pemohon izin yang datang langsung ke kantor dan mengisi blangko kepuasan masyarakat, dan secara berkala hasil dari survey tersebut akan dievaluasi untuk memperbaiki sistem pelayanan yang sudah berjalan.

2.3.1 Capaian Kinerja KP3M Tahun 2009 – 2013

Capaian kinerja pelayanan KP3M Kabupaten Temangggung berdasarkan rencana strategi KP3M tahhun 2009 – 2013 dan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2009 – 2013 dengan indikator sesuai urusan yang menjadi tugas dan fungsi KP3M sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 2.3.1**

Pencapaian Kinerja Pelayanan KP3M

Kabupaten Temanggung Tahun 2009 – 2013

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SARAN | | | KEBIJAKAN | | | | | PROGRAM | | | | TARGET KINERJA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | CAPAIAN KINERJA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya penanaman modal bagi pengembangan potensi unggulan daerah | | | Menyediakan akses informasi dan promosi investasi | | | | | Peningkatan promosi dan kerjasama investasi | | | | 1 | | Terlaksananya promosi dan informasi investasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | Terlaksananya promosi dan informasi investasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 | | | | | | | | 2010 | | | | | | | | | 2011 | | | | | | | | 2012 | | | | | | 2013 | | | | | | |  | | | 2009 | | | | | | | 2010 | | | | | | 2011 | | | | | | | | | 2012 | | | | | | | | 2013 | | | | |
| 3 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | 2 | | | | |
| 2 | | Terlaksananya ekspose investasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | Terlaksananya ekspose investasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 | | | | | | | | 2010 | | | | | | | | | 2011 | | | | | | | | 2012 | | | | | | 2013 | | | | | | | 2009 | | | | | | | 2010 | | | | | | | 2011 | | | | | | | | 2012 | | | | | | | | 2013 | | | | |
| 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | |
| 3 | | Jumlah kerjasama penanaman modal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | Jumlah kerjasama penanaman modal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 | | | | | | | | 2010 | | | | | | | | | 2011 | | | | | | | | 2012 | | | | | | 2013 | | | | | | | 2009 | | | | | | | 2010 | | | | | | | | 2011 | | | | | | | 2012 | | | | | | | | 2013 | | | | |
| 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | |
| 4 | | Jumlah kerjasama kemitraan pengusaha besar/ menengah denganpengusaha kecil dalam | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | 4 | | | | | | | | Jumlah kerjasama kemitraan pengusaha besar/ menengah denganpengusaha kecil dalam | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 | | | | | | | | | 2010 | | | | | | | | | 2011 | | | | | | | | 2012 | | | | 2013 | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | 2009 | | | | | 2010 | | | | | | | | | | 2011 | | | | | | | 2012 | | | | | | | | 2013 | | | |
| 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 3 | | | | | | | | 1 | | | |
| 5 | | Tercukupinya investasi di daerah (milyar Rp) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | Tercukupinya investasi di daerah (milyar Rp) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 | | | | | | | | | 2010 | | | | | | | | | 2011 | | | | | | | | 2012 | | | | 2013 | | | | | | | | | | 2009 | | | | | 2010 | | | | | | | | 2011 | | | | | | | | 2012 | | | | | | | | | | 2013 | | |
| 5 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 10 | | | | 12 | | | | | | | | | | 38 | | | | | 25 | | | | | | | | 112 | | | | | | | | 123 | | | | | | | | | | 99,810 | | |
|  | | | | |  | | |  | | | | 6 | | | Meningkatnya investasi di daerah (milyar Rp) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | 6 | | | | | | | | | Meningkatnya investasi di daerah (milyar Rp) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 | | | | 2010 | | | | | | | | | 2011 | | | | | | | | 2012 | | | | | | | | | | 2013 | | | | | 2009 | | | | | | 2010 | | | | | | | 2011 | | | | | | | | | 2012 | | | | | | | | 2013 | | | | |
| 200 | | | | 50 | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | 50 | | | | | 50 | | | | | | (13) | | | | | | | 87 | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | (24) | | | | |
|  | | | | | Penataan regulasi perundang-undangan dibidang penanaman modal dan prosedur perijinan | | | Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi | | | | 1 | | | Tersedianya produk hukum di bidang investasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | 1 | | | | | | | | | Tersedianya produk hukum di bidang investasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 | | | | 2010 | | | | | | | | | 2011 | | | | | | | | 2012 | | | | | | | | | | 2013 | | | | |  | | |  | | | | | | | | | 2009 | | | | | | 2010 | | | | | | | 2011 | | | | | | | | | 2012 | | | | | | | | 2013 | | | | |
| 9 | | | | 1 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 3 | | | | |
| 2 | | | Frekuensi pengendalian kegiatan investasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | 2 | | | | | | | | | Frekuensi pengendalian kegiatan investasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 | | | | | 2010 | | | | | | | | | 2011 | | | | | | | | 2012 | | | | | | | | | | 2013 | | | |  | | |  | | | | | | | | | 2009 | | | | | 2010 | | | | | | | | 2011 | | | | | | | | 2012 | | | | | | | 2013 | | | | | | |
| 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | | 0 | | | | | 1 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 3 | | | | | | | 2 | | | | | | |
| 3 | | | Frekuensi monitoring kegiatan investasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | 3 | | | | | | | | | Frekuensi monitoring kegiatan investasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 | | | | | | 2010 | | | | | | | | | 2011 | | | | | | | | 2012 | | | | | | | | | | 2013 | | |  | | |  | | | | | | | | | 2009 | | | | | | 2010 | | | | | | | 2011 | | | | | | | | 2012 | | | | | | | 2013 | | | | | | |
| 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | 0 | | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | |
|  | | | | | Menyediakan sarpras pendukung investasi | | | Penyiapan potensi sumber daya sarana dan prasarana daerah | | | | 1 | | | Terciptanya kawasan pertumbuhan investasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | 1 | | | | | | | | | Terciptanya kawasan pertumbuhan investasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 | | | | | | | 2010 | | | | | | | | | 2011 | | | | | | | | 2012 | | | | | | 2013 | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | 2009 | | | | | 2010 | | | | | | | | 2011 | | | | | | | | 2012 | | | | | | | | 2013 | | | | | |
| 3 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 0 | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | | |  | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | |
| 2 | | | Tersusunnya profil potensi penanaman modal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | 2 | | | | | | | | | Tersusunnya profil potensi penanaman modal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | |  | | | | 2009 | | 2010 | | | | | | | | | 2011 | | | | | | | | | 2012 | | | | | | | | 2013 | | | | | | | |  | |  | | | | | | 2009 | | | | | | | | 2010 | | | | | | | 2011 | | | | | | | | 2012 | | | | | | | 2013 | | | | | | | | |
| 0 | | 1 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 1 | | | | | | 0 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 3 | | | | Tersedianya data potensi penanaman modal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 3 | | | | | | | Tersedianya data potensi penanaman modal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 | | | 2010 | | | | | | | | | 2011 | | | | | | | | 2012 | | | | | | | | | 2013 | | | | | | |  | |  | | | | | | | 2009 | | | | | | | 2010 | | | | | | | 2011 | | | | | | | | | 2012 | | | | | | 2013 | | | | | | | | |
| 0 | | | 1 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan terpadu | | | Penyediaan sarpras pendukung investasi daerah | | | | Pelayanan perijinan terpadu | | | | 1 | | | | penyederhanaan sistem dan prosedur pelayanan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 1 | | | | | | | | penyederhanaan sistem dan prosedur pelayanan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 | | | 2010 | | | | | | | | | 2011 | | | | | | | | 2012 | | | | | | | | | 2013 | | | | | | |  | |  | | | | | | | | 2009 | | | | | | 2010 | | | | | | | | 2011 | | | | | | | | 2012 | | | | | | | 2013 | | | | | | | |
| 1 | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | Jumlah ijin yang dikeluarkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 2 | | | | | | | | | Jumlah ijin yang dikeluarkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 | | | | 2010 | | | | | | | | | 2011 | | | | | | | | 2012 | | | | | | | | | 2013 | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | 2009 | | | | 2010 | | | | | | | | | 2011 | | | | | | | | 2012 | | | | | | 2013 | | | | | | | |
| 2500 | | | | 2700 | | | | | | | | | 2900 | | | | | | | | 3100 | | | | | | | | | 3300 | | | | | | 1931 | | | | 2862 | | | | | | | | | 3438 | | | | | | | | 2607 | | | | | | | 1200 | | | | | | |
| 3 | | | | Terbangunnya gedung pelayanan terpadu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 3 | | | | | | | | | Terbangunnya gedung pelayanan terpadu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | 2009 | | | | 2010 | | | | | | | | | 2011 | | | | | | | | 2012 | | | | | | | | | 2013 | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | 2009 | | | | | 2010 | | | | | | | | 2011 | | | | | | | | 2012 | | | | | | | 2013 | | | | | | |
| - | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | 1 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | |

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa hampir semua indikator kinerja KP3M memenuhi target yang diharapkan, ini berkat komitmen jajaran pemerintah kabupaten Temanggung dan KP3M khususnya dalam meningkatkan dan selalu mengevaluasi kinerjanya, dan keberhasilan ini juga didukung adanya kerjasama dengan dunia usaha baik skala kecil, menengah dan besar yang telah meningkat kesadarannya akan kebutuhan ijin sebagai legalisasi usaha mereka, dan juga kesiapan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mempersiapkan infrastrukturnya dalam menghadapi dorongan investor sehingga ada daya tarik dan nilai jual yang ditawarkan kepada investor sehingga menanamkan modalnya ke daerah. Beberapa indikator yang tidak memenuhi target adalah jumlah ijin yang dikeluatkan karena pada 2 (dua) tahun terakhir penanganan ijin untuk skala kecil dilimpahkan ke kecamatan dengan tujuan agar mempermudah dan mempercepat pelayanan bagi daerah- daerah yang terpencil sehingga bisa dilayani cukup di kecamatan terdekat.

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan KP3M Tahun 2009 – 2013

Analisis pengelolaan pendanaan pelayanan KP3M melalui pelaksanaan renstra KP3M tahun 2009-2013 untuk mengindentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan KP3M Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut pada tabel 2.2

**Tabel 2.3.2.**

Anggaran dan Realisasi Pendanaan KP3M

Kabupaten Temanggung Tahun 2009 - 2013

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uraian | Anggaran pada tahun ke – | | | | | Realisasi anggaran pada tahun ke - (000) | | | | | Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke- | | | | | Rata – rata pertumbuhan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | anggaran | realisasi |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Anggaran KP3M | 299.221.500 | 257.761.000 | 794.935.701 | 607.108.860 | 769.407.600 | 253.686.300 | 252.597.490 | 755.931.254 | 588.642.984 | 689.148.996 | 84,7821 | 97,9968 | 95,09 | 96,96 | 89,57 | 10 – 20 % | 10 – 20 % |

Dari tabel diatas terlihat rasio antara realisasi dan anggaran dari tahun 2009 – 2013 terlihat cukup stabil hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran di KP3M dan sudah menerapkan kebutuhan anggaran berbasis kinerja dengan memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang mendesak dan pelaksanaannya juga diusahakan pada awal tahun sehingga penyerapan anggarapun bisa optimal.

**2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KP3M**

Analisa strategis ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisa SWOT (Strength,Weaknessess, Opportunities dan Treats) yang memadukan antara kekuatan, kelemahan serta peluang dan tantangan. Sebelumya , akan diuraikan terlebih dahulu mengenai kondisi awal dan kondisi yang diharapkan oleh organisasi, yaitu sebagai berikut :

1. Bidang Penanaman Modal sendiri belum dijadikan sebagai prioritas dan daya ungkit bangkitnya perekonomian daerah, Pemerintah Daerah masih melulu memprioritaskan masalah penanganan pelayanan perizinan, padahal jika Pemerintah Daerah sudah berkomitmen ingin mengembangkan investasi maka yang perlu dibenahi terlebih dahulu adalah kebijakan atau payung hukum atas kepastian hukum berinvestasi, infrastruktur yang terus dibenahi, penyiapan lahan dan tentunya nilai tambah yang bisa dijual kepada investor agar Kabupaten Temanggung bisa lebih menarik daripada daerah lainnya baru setelah itu masuk ke pembenahan dalam hal pelayanan perizinannya.
2. Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung masih besifat administratif atau koordinator terhadap SKPD teknis pengelola perizinan dan penanaman modal
3. Fungsi manajemen dalam pelayanan belum dioptimalkan, Fungsi ini meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi.
4. Hubungan lintas teknis masih bersifat ego sektoral dengan lebih mementingkan keuntungan SKPD sendiri tanopa melihat tujuan akhir dalam pelayanan publik yaitu untuk kepentingan masyarakat dalam hal ini dunia usaha
5. Sistem pengarsipan belum optimal, sehingga terjadi kesulitan jika dibutuhkan pencarian data yang sudah lama
6. Pengoperasian data berbasis jaringan belum dijalankan secara optimal sehingga ketika dibutuhkan data yang valid dan aktual, personil masih membutuhkan waktu yang lama, ini bisa jadi dikarenakan keterbatasan jumlah SDM yang ada dan pemanfaatan sarpras itu sendiri
7. Belum dioptimalkan hubungan dengan pihak ketiga atau calon investor. Selama ini baru terjadi deal-deal yang belum ada tindak lanjutnya setelah promosi investasi diselenggarakan
8. Belum jelasnya kepastian akan pengembangan organisasi KP3M (SOTK)

Dengan melihat kondisi Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung saat ini , maka hal-hal yang harus dibenahi kedepan dan memperhatikan perubahan organisasi KP3M mendatang adalah sebagai berikut :

1. Menjadikan bidang penanaman modal sebagai bidang yang diprioritaskan dengan mengoptimalkan dan memberdayakan semua sumberdaya daerah yang ada guna memacu pendapatan daerah
2. Peran organisasi dioptimalkan tidak hanya sebagai koordinator tapi juga sebagai fasilitatot administrasi bidang perizinan dan non perizinan serta penanaman modalnya
3. Meningkatkan komunikasi dan komitmen searah antara lintas SKPD pengelola perizinan maupun antar lintas seksi di internal KP3M
4. Membenahi pengarsipan dan pengelolaan data yang akurat dengan memanfaatkan pengembangan aplikasi teknologi informasi (IT) dan jaringan internet
5. Terus diintesifkan dan memperbaiki cara berkomunikasi dengan pihak ketiga /calon investor disamping mengembangkan penampilan stand dan kemasan promosi pada event-event promosi investasi sebagai jembatan awal daya tarik investasi
6. Diupayakan adanya pengembangan organisasi sesuai dengan yang aturan Pemerintah Pusat dengan maksud agar kinerja organisasi lebih optimal

Identifikasi Faktor Eksternal dan Internal Organisasi

Faktor Eksternal yang telah teridentifikasi adalah :

1. Peluang
2. Kecenderungan investasi yang beralih ke daerah dari pusat dikarenakan penyediaan lahan dan tenaga kerja yang lebih muarah
3. Tuntutan peningkatan kinerja pelayanan perizinan dan penanaman modal
4. Berkembangnya teknologi informasi (IT) yang semakin mempermudah operasional kerja maupun mempermudah dan mempercepat akses informasi kepada pemohon ijin dan calon investor
5. Adanya regulasi yang mendukung peningkatan kesejahteraan pegawai dengan beban kerja tinggi
6. Ancaman
7. Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat atau adanya pandangan miring terhadap para personil pemberi pelayanan perizinan
8. Masih pesimisnya pihak ketiga/ calon investor terhadap daerah akan komitmennya terhadap investasi, ini
9. Regulasi dibidang penanaman modal yang dianggap masih kurang menarik dibanding daerah-daerah lain

Faktor internal organisasi yang sudah diidentifikasi adalah :

1. Kekuatan
2. Adanya pengembangan SOTK organisasi perizinan dan penanaman modal yang memungkinkan berkembang pula wewenang dan peningkatan kinerja perizinan dan penanaman modal
3. Adanya komitmen dari seluruh personil KP3M dalam memperbaiki kinerja dan terus mengevaluasi kemampuannya agar terus maju
4. Kelemahan
5. Sumber daya manusia dinilai masih lemah baik terkait dengan kemampuan personil maupun keterbatasan jumlah
6. Koordinasi lintas Seksi masih dinilai kurang maksimal
7. Fasilitas untuk pendidikan dan pelatihan masih minim

**BAB III**

**ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

**3.1. Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan KP3M**

Permasalahan umum yang dihadapi oleh KP3M antara lain :

Dalam hal perizinan, pemerintah sudah melakukan pembenahan baik dalam kinerja pelayanan kepada masyarakat maupun dengan merombak tata kelembagaannya. Perubahan kelembagaan ini tidak tanpa alasan, karena pemerintah ingin memberikan layanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat, namun persoalannya tidak sederhana, kondisi kelembagaan yang menjadi wadah birokrasi sekaligus sebagai kinerja birokrasi terlanjur sudah terpola begitu lama. Perubahan kelembagaan perizinan tidak lepas dari persoalan perizinan dibidang investasi yang dinilai memerlukan biaya tinggi dan memerlukan waktu yang lama. Perombakan kelembagaan dilakukan karena sebelumnya penanganan perizinan dilakukan secara sektoral, tiap-tiap izin ditangani sendiri-sendiri oleh instansi-instansi teknis yang berwenang.

Adanya izin tidak terlepeas dari interaksi pemerintah dan warganya. Interaksi ini berhubungan dengan kebutuhan warga dan dan pelayanan dari pemerintah, sehingga yang tidak dapat dihindari adalah pemenuhan kebutuhan dalam melakukan pelayanan agar memadai. Pemerintah memang bisa menuntut berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemegang izin, namun pemerintah juga harus mengimbangi dengan kelengkapan yang memadai sehingga persyaratan yang diminta kepada pemohon dapat relevan dan ada artinya dalam menentukan izin. Dalam hal ini keberadaan pemenuhaan dalam penyempurnaan sarana prasarana adalah hal yang mutlak.

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan KP3M

Kabupaten Temanggung

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aspek kajian | Capaian / kondisi saat ini | Standar yang digunakan | Faktor yang mempengaruhi | | Permasalahan pelayanan SKPD |
| Internal ( kewenangan SKPD ) | Eksternal ( diluar kewenangan SKPD ) |
| Peningkatan investasi | Masih rendahnya jumlah investasi yang masuk | Jumlah investor dan nilai investasi | * Kewenangan KP3M dalam pemberian izin belum penuh * Penggunaan teknologi informasi masih rendah * Keterbatasan personil | * Masih belum terjadi kesamaan pola pikir dalam hal mendorong investasi diantara para pengelola perizinan penanaman modal (ego sektoral) * Belum dioptimalkan peran Profil Investasi sebagai sarana utama daya tarik yang bisa dijual ke calon investor * Kurang dibangunnya komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dengan calon investor * Regulasi yang berbenturan antara pemerintah pusat dan daerah | Masih belum optimalnya fungsi manajemen tugas seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang prima | Masih rendahnya kepercayaan publik terhadap pengelola perizinan | Survey kepuasan Masyarakat | * Keterbatasan SDM baik dalam jumlah maupun kemampuan * Belum diptimalkan penggunaan teknologi informasi (IT) * Kurang memiliki daya tarik / kreatifitas dalam pelayanan perizinan | * Adanya regulasi yang dinilai belum manampung kebutuhan masyarakat dunia usaha | Masih belum optimalnya fungsi manajemen tugas seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi |

**3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih**

**KABUPATEN TEMANGGUNG**

**TAHUN 2014 - 2018**

**VISI**

**“TERWUJUDNYA TEMANGGUNG SEBAGAI DAERAH AGRARIS BERWAWASAN LINGKUNGAN, MEMILIKI MASYARAKAT AGAMIS, BERBUDAYA, DAN SEJAHTERA**

**DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH”**

**Daerah agraris berwawasan lingkungan** merupakan sebuah kondisi daerah yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi daerah yang secara ekonomi bertumpu pada sektor pertanian sebagai penggerak utama perekonomian daerah dan tumpuan kehidupan masyarakat. Sebagai sektor penggerak perekonomian daerah maka pengembangan sektor pertanian tetap dengan memperhatikan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

**Masyarakat Agamis** merupakan sebuah kondisi masyarakat yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi dimana selain terpenuhinya kebutuhan jasmani masyarakat Kabupaten Temanggung, namun juga terpenuhinya kebutuhan rohani yang ditandai dengan sikap dan akhlak mulia yang sesuai dengan pemahaman, penghayatan, pengamalan ajaran agama, dan didukung dengan kebebasan menjalankan ajaran agama, serta toleransi antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga diharapkan seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Temanggung selalu tidak meninggalkan norma-norma agama.

**Berbudaya** merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi masyarakat yang memiliki budaya sehat, budaya peduli pendidikan, budaya kebersihan lingkungan khususnya tempat tinggal dan lingkungan perumahan, dan budaya peduli atas lingkungan sosial kemasyarakatan dan kebudayaan yang berkembang di lingkungan sekitarnya.

**Sejahtera** merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi masyarakat dimana seluruh individu masyarakat dapat mencukupi kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat karena terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, dan religius. Sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah yang berkelanjutan.

**Pemerintahan yang bersih** merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi pelaksanaan pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sesuai dengan arah pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga terwujud pemerintahan yang bersih di semua aspek pelaksanaan pemerintahan.

**MISI**

Untuk mewujudkan Visi Daerah Kabupaten Temanggung di atas, pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dilakukan dalam 6 (enam) Misi Daerah, yaitu:

1. Mewujudkan Pertanian Moderen yang Berwawasan Lingkungan;
2. Mewujudkan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera;
3. Mewujudkan Infrastruktur Permukiman Perdesaan dan Perkotaan yang Layak dan Berwawasan Lingkungan;
4. Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas tanpa Meninggalkan Kearifan Lokal;
5. Mewujudkan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat;
6. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut di atas, maka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Tahun 2014 - 2018 harus memiliki langkah, gerak, arah, semangat, dan dinamika yang sama.

Disamping hal tersebut, pelaksanaan pembangunan juga memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari: keterkaitan, keseimbangan, dan keadilan. Keterkaitan diartikan sebagai keterkaitan antar wilayah, antar sector, antar tingkat pemerintahan, dan antar pemangku kepentingan pembangunan. Keseimbangan diartikan sebagai keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Keadilan diartikan sebagai keadilan antar kelompok masyarakat dan generasi.

Untuk menyatukan langkah, gerak, arah, semangat, dan dinamika para pemangku kepentingan pembangunan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Temanggung menetapkan sebuah tekad pembangunan yang dituangkan dalam sebuah Motto yaitu:

**“BERSAMA MEMBANGUN TEMANGGUNG”**

Sebuah tekad yang mengandung pemahaman bahwa pembangunan daerah merupakan tanggung-jawab bersama seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Menelaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun mendatang dan untuk mengidentifikasi faktor – faktor penghambat dan pendorong pelayanan KP3M Kabupaten Temanggung yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Telaahan sebagaimana dimaksud tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3.2

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan KP3M

Terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Visi : TERWUJUDNYA TEMANGGUNG SEBAGAI DAERAH AGRARIS BERWAWASAN LINGKUNGAN, MEMILIKI MASYARAKAT AGAMIS, BERBUDAYA, DAN SEJAHTERA DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH** | | | | |
| NO | Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih | Permasalahan pelayanan SKPD | Faktor | |
| Penghambat | Pendorong |
| 1 | Misi Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik. |  |  |  |
| A | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | Masih belum optimalnya fungsi manajemen tugas seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi | Belum optimalnya peran profil investasi, infrastruktur, dan belum dimaksimalkan peran IT | Peraturan perundangan |
| B | Program Peningkatan Pelayanan Perizinan | Masih belum optimalnya fungsi manajemen tugas seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi | Masih terjadi ego sektoral dan, keterbatasan SDM dan belum dimalksimalkan peran IT | Peraturan perundangan |

* 1. **Telaahan Struktur Ruang Wilayah**

Sebagai daerah yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi dan sedang menghadapi persaingan daya tarik antar daerah dalam menghadapi arus datangnya investasi ke daerah, maka diperlukan peta investasi yang jelas. Peta ini tidak saja mencakup potensi yang dimiliki di tiap daerah termasuk Kabupaten Temanggung tapi juga mengatur pola pengaturan investasi yang berkaitan dengan pertumbuhan yang merata,faktor lingkungan yang berkelanjutan dan faktor sosial. Dengan memperhatihan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu melakukan perencanaan dengan matang terkait pola tata ruang, kaitannya dalam hal ini adalah peruntukan kawasan industri, permukiman, ruang terbuka hijau, pertanian dan usaha baik kecil, menengah dan besar dan juga diselaraskan dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia (tenaga kerja) yang dimiliki. Tentunya berkaitan dengan pelayanan perizinan akan dikaitkan pengawasan dan sebagai dasar suatu ijin diterbitkan atau tidak atas permohonan pendirian bangunan, apakah sudah sesuai dengan regulasi tata ruang yang ada atau malah melenceng dari ketentuan yang sudah ada, dan ini tentu dibutuhkan konsistensi atas pelaksanaan dari regulasi itu sendiri, jangan sampai karena adanya tuntutan beberapa orang tanpa memperhatikan regulasi yang sudah disepakati maka terjadi alih fungsi kawasan.

Berikut Hasil Telaah Pola Ruang Wilayah dikaitkan dengan

Tabel 3.3

Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Rencana Pola Ruang | Pola Ruang saat ini | Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan berkenaan | Pengaruh Rencana Pola ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD | Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD |
| 1. | Smua peruntukan kawasan seharusnya mencakup wilayah secara penuh tidak setengah –setengah | RTRW Kab. Temanggung | Peruntukan kawasan industri belum sepenuhnya untuk industri | Mempermudah pengawasan dan pengendalian | Sebagai dasar penerbitan izin, agar izin yang keluar sesuai dengan ketentuan tata ruang yang ada |

**3.4. Penentuan Isu – isu Strategis**

Berdasarkan faktor-faktor internal dan eksternal yang disebutkan dalam Bab II di atas, maka dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Mengembangkan kapasitas kelembagaan agar wewenang yang dimiliki semakin kuat.
2. Menerapkan teknologi informasi (IT) untuk semua aspek pekerjaan
3. Mengembangkan kapasitas personil melalui pendidikan dan pelatihan terus menerus
4. Menumbuhkan kepercayaan pada masyarakat melalui sikap kerja yang profesional
5. Terus menerus meningkatkan kewibawaan personil dimata masyarakat melalui terciptanya tanggung jawab, bersih dan terbebas dari kesan KKN
6. Mengalokasikan anggaran yang lebih besar pada kegiatan-kegiatan priroritas yang memacu daya ungkit pereonomian seperti penanaman modal dan pelayanan perizinan
7. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang baik antar pengelola perizinan
8. Mengoptimalkan peran dari Profil Investasi sebagai pintu awal daya tarik investasi
9. Terus memperbaharui peraturan perundangan terkait penanaman modal dan pelayanan perizinan

**BAB IV**

**VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN**

**4.1. Visi dan Misi KP3M**

Visi Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung dalam menghadapi tuntutan dimasa depan dan tuntutan kerja dirumuskan untuk Tahun 2014 – 2018 adalah ”*Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang Bersih dan Transparan demi Meningkatnya Investasi”*

Untuk mewujudkan visi kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung, maka dirumuskan melalui Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)
2. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berdasarkan standar dan prosedur pelayanan yang transparan dan memiliki kepastian hukum
3. Mendorong masuknya investor

**4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Mengengah KP3M**

Tujuan adalah pernyataan – pernyataan tentang hal – hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menanggani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dilaksanakan selama lima tahun kedepan.

Tujuan dan sasaran Renstra KP3M sebagai berikut

**Misi 1.**  Meningkatkan pelayanan masyarakat yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);

Tujuan :

* Meningkatkan kualitas kinerja aparat pelayanan yang bersih dan berwibawa serta mempunyai kesadaran dalam penegakan hukum

Sasaran:

Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan perizinan dan non perizinan

**Misi 2.** Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berdasarkan standar dan prosedur pelayanan yang transparan dan memiliki kepastian hukum

Tujuannya :

* Meningkatkan koordinasi antar SKPD dalam rangka memberikan pelayanan perizinan dan penanaman modal yang mudah, transparan dan mempunyai kepastian hukum

Sasaran :

Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan perizinan dan non perizinan .

**Misi 3.** Mendorong masuknya investor

Tujuannya :

* Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga atau calon investor dalam pengembangan investasi di daerah
* Mengoptimalkan Profil investasi sebagai sarana utama daya jual kepada pihak ketiga atau calon investor

sasaran :

Meningkatnya investasi di daerah

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan KP3M Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan KP3M

Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tujuan Sasaran | Sasaran | Indikator | Target Renstra | | | | |
| Th 2014 | Th 2015 | Th 2016 | Th 2017 | Th 2018 |
|  | * Meningkatkan kualitas kinerja aparat pelayanan yang bersih dan berwibawa serta mempunyai kesadaran dalam penegakan hukum * Meningkatkan koordinasi antar SKPD dalam rangka memberikan pelayanan perizinan dan penanaman modal yang mudah, transparan dan mempunyai kepastian hukum | Meningkatnya kualitas dan kuantitas perizinan dan non perizinan | Cakupan jenis perizinan yang memiliki SPP/SOP | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Persentase penanganan pengaduan masyarakat | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Penerbitan IUJK dalam waktu 6 (enam ) hari kerja setelah persyaratan lengkap | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
|  | * Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga atau calon investor dalam pengembangan investasi di daerah * Mengoptimalkan Profil investasi sebagai sarana utama daya jual kepada pihak ketiga atau calon investor | Meningkatnya investasi di daerah | Laju investasi | 18.776 | 16.287 | 14.430 | 14.430 | 14.430 |
| Nilai Investasi | 160 M | 165 M | 170 M | 170 M | 170 M |
| Besaran investor pertahun | 190/874 | 200/1074 | 210/1284 | 220/1504 | 230/1734 |
| Besaran promosi peluang investasi dan kemitraan dengan dunia usaha | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| Besaran pelayanan perizinan dan non perizinan bid PM melalui PTSP dibid. PM | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Besaran implementasi SPIPISE | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN KP3M**

Strategi dan kebijakan dalam rencana strategi KP3M adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah KP3M Kabupaten Temanggung tahun 2014 – 2018 yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018. Kebijakan adalah program dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih sehingga lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi dan kebijakan KP3M Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018 adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 4.3.**

Strategi dan kebijakan KP3M

Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VISI : *Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang Bersih dan Transparan demi Meningkatnya Investasi”* | | | | |
| **Misi 1.** Meningkatkan pelayanan masyarakat yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); | | | | |
| Tujuan | Sasaran | | Strategi | Kebijakan |
| * Meningkatkan kualitas kinerja aparat pelayanan yang bersih dan berwibawa serta mempunyai kesadaran dalam penegakan hukum | Meningkatnya kualitas dan kuantitas perizinan dan non perizinan | | * Menciptakan suasana yang nyaman dalam proses pelayanan * Meningkatkan volume pendidikan dan pelatihan tentang perizinan dan penanaman modal * Meningkatkan sistem pemberian insentif bagi pegawai KP3M | * Meningkatkan kemampuan SDM yang semakin kompeten karena berkaitan dengan permasalahan permohonan izin yang semakin berkembang melalui pendidikan dan pelatihan serta sosialisasi peraturan perundangan-undangan * Memberikan insentif kepada pegawai KP3M * Membangun kantor yang representatif dan mengakomodasi pengaduan |
| **Misi 2.** Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berdasarkan standar dan prosedur pelayanan yang transparan dan memiliki kepastian hukum | | | | |
| Meningkatkan koordinasi antar SKPD dalam rangka memberikan pelayanan perizinan dan penanaman modal yang mudah, transparan dan mempunyai kepastian hukum | | Meningkatnya kualitas dan kuantitas perizinan dan non perizinan | * Membangun sistem koordinasi yang kuat antar SKPD pengelola perizinan agar pelayanan perizinan dan penanaman modal bisa lancar dan tepat waktu | * Mempersiapkan rumusan Peraturan Daerah dibidang perizinan melalui penyederhanaan dalam tahapan ijin * Meningkatkan kerjasama dan komitmen diantara para pemangku kebijakan (stake holders) perizinan , sehingga tidak ada keadaan yang menjadikan suatu ijin butuh waktu yang sangat lama dikarenakan tidak adanya satu komitmen bersama dalam rangka pertumbuhan dunia usaha bahwa mereka butuh kepastian waktu |
| **Misi 3.** Mendorong masuknya investor | | | | |
| * Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga atau calon investor dalam pengembangan investasi di daerah * Mengoptimalkan Profil investasi sebagai sarana utama daya jual kepada pihak ketiga atau calon investor | | Meningkatnya investasi di daerah | * Meningkatkan promosi potensi ekonomi dan investasi melalui event-event promosi baik tingkat daerah maupun nasional * Memudahkan akses masyarakat dalam mengurus perizinan penanaman modal * Bekerjasama dengan para pemangku kebijakan untuk berupaya membangun infrastruktur penyiapan investasi | * Menyiapkan rumusan seperangkat Peraturan Daerah yang memberikan peluang investasi, memberikan kemudahan dalam ijin dan keringanan dalam biaya agar investor lebih tertarik menanamkan modal atau usahanya di Kabupaten temanggung * Penataan Profil Investasi semakin dibutuhkan karena memudahkan investor dalam melihat peta potensi di wilayah-wilayah Kabupaten Temanggung sesuai Rencana Tata Ruang wilayah * Menyiapkan SDM dalam pengelolaan SPIPISE |

**BAB V**

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Penyusunan rencana program dan kegiatan KP3M dilaksanakan untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran serta sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik dan internet
2. Penyediaan jasa kebersihan kantor
3. Penyediaan ATK
4. Penyediaan barang cetak dan penggandaan
5. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
6. Pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundangan
7. Penyediaan makan dan minuman
8. Rapat – rapat koordinasidan konsultasi keluar daerah
9. Rapat – rapat koordinasidan konsultasi dalam daerah
10. Jasa Pengamanan kantor
11. Penyediaan jasa surat menyurat
12. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1. Pengadaan peralatan gedung kantor
2. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
3. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
4. Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor
5. Pengadaan mebelair
6. Rehabilitasi sedang/ barat gedung kantor

3. Program peningkatan disiplin aparatur

1. Survey IKM
2. ISO
3. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

4. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

1. Pengembangan potensi unggulan
2. Penyelenggaraan pameran investasi
3. Monev dan pelaporan
4. Penyelenggaraan temu usaha
5. Penyusunan profil investasi
6. Kajian Kebijakan PM
7. Pengembangan sistem informasi PM di daerah
8. Sosialisasi peraturan perundang-undangan bid. PM
9. Penyusunan cetak biru (master plan) PM
10. Pengadaan SIM Perizinan
11. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
12. Sistem informasi pelayanan perizinan
13. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
14. Monev dan pembinaan kecamatan
15. Peningkatan pelayanan perizinan satu pintu
16. Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan
17. Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan perizinan
18. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
19. Kegiatan Review Perda
20. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
21. Penyusunan dokumen dan pelaporan SKPD

Adapun kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagaimana terlampir.

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif KP3M

Kabupaten Temanggung

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MISI | Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Daerah (Indikator Program) dan Indikator Kegiatan | Data Capaian pada Tahun 2012 | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
| 2013 (Sesuai APBD 2013) | | | 2014 (sesuai DPA 2014) | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
| Target | prediksi capaian | Rp | Target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, tidak KKN dan berorientasi pada pelayanan publik | * Meningkatkan kualitas kinerja aparat pelayanan yang bersih dan berwibawa serta mempunyai kesadaran dalam penegakan hukum | Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan perizinan dan non perizinan | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran |  |  |  |  | **273.316.300** |  | **192.321.400** |  | **227.700.000** |  | **255.200.000** |  | **280.000.000** |  | **296.500.000** |
| Keg.Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA, Listrik dan Internet | Terbayarnya rekening telepon, air, listrik dan internet | 100% | 12 bln | 100% | 18.820.000 | 12 bln | 25.200.000 | 12 bln | 20.000.000 | 12 bln | 25.000.000 | 12 bln | 30.000.000 | 12 bln | 30.000.000 |
|  | Keg.Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | tersedianya alat kebersihan kantor | 100% | 12 bln | 100% | 5.000.000 | 12 bln | 5.265.500 | 12 bln | 6.000.000 | 12 bln | 7.000.000 | 12 bln | 8.000.000 | 12 bln | 8.000.000 |
|  | Keg.Penyediaan ATK | Tersedianya ATK | 100% | 12 bln | 100% | 11.569.300 | 12 bln | 11.341.900 | 12 bln | 17.000.000 | 12 bln | 18.000.000 | 12 bln | 19.000.000 | 12 bln | 20.000.000 |
| Meningkatkan koordinasi antar SKPD dalam rangka memberikan pelayanan perizinan dan penanaman modal yang mudah, transparan dan mempunyai kepastian hukum | Keg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tercukupinya barang-barang cetakan | 100% | 12 bln | 100% | 136.102.500 | 12 bln | 57.973.600 | 12 bln | 70.000.000 | 12 bln | 70.000.000 | 12 bln | 75.000.000 | 12 bln | 75.000.000 |
|  |  | Keg. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | Tersedianya alat penerangan listrik | 100% | 12 bln | 100% | 2.000.000 | 12 bln | 2.161.000 | 12 bln | 3.500.000 | 12 bln | 4.000.000 | 12 bln | 4.500.000 | 12 bln | 5.000.000 |
|  |  |  | Keg. Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan | Tersedianya bahan bacaan | 100% | 12 bln | 100% | 1.800.000 | 12 bln | 1.800.000 | 12 bln | 2.000.000 | 12 bln | 2.000.000 | 12 bln | 2.500.000 | 12 bln | 2.500.000 |
|  |  | Keg. Penyediaan Makanan dan minuman | tercukupinya jamuan rapat dan minuman harian pegawai | 100% | 12 bln | 100% | 14.374.500 | 12 bn | 16.000.000 | 12 bln | 20.000.000 | 12 bln | 25.000.000 | 12 bln | 25.000.000 | 12 bln | 25.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah | Terfasiltasinya perjalanan dinas luar daerah | 100% | 12 bln | 100% | 56.650.000 | 12 bln | 38.320.000 | 12 bln | 40.000.000 | 12 bln | 45.000.000 | 12 bln | 50.000.000 | 12 bln | 55.000.000 |
|  |  |  | keg Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam daerah | Terfasilitasinya perjalanan dinas dalam daerah | 100% | 12 bln | 100% | 7.000.000 | 12 bln | 10.000.000 | 12 bln | 15.000.000 | 12 bln | 20.000.000 | 12 bln | 25.000.000 | 12 bln | 30.000.000 |
|  |  |  | Keg. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Tersedianya penjaga malam gedung kantor | 100% | 12 bln | 100% | 20.000.000 | 12 bln | 24.259.400 | 12 bln | 30.000.000 | 12 bln | 35.000.000 | 12 bln | 35.000.000 | 12 bln | 40.000.000 |
|  |  |  | Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya benda-benda pos |  |  |  |  |  |  | 12 bln | 1.800.000 | 12 bln | 1.800.000 | 12 bln | 2.400.000 | 12 bln | 2.400.000 |
|  |  |  | Keg. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kaerja | Tersedianya tenaga reparasi peralatan kantor |  |  |  |  |  |  | 12 bln | 2.400.000 | 12 bln | 2.400.000 | 12 bln | 3.600.000 | 12 bln | 3.600.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Program Peningatan Sarana Prasarana Aparatur** |  |  |  |  | **193.227.000** |  | **161.894.000** |  | **885.000.000** |  | **145.000.000** |  | **160.000.000** |  | **175.000.000** |
|  |  |  | Keg. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Tersedianya peralatan kerja | 100% | 4 unit | 100% | 27.000.000 | 2 unit | 64.980.000 | 3 unit | 30.000.000 | 4 unit | 30.000.000 | 4 unit | 35.000.000 | 4 unit | 35.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Keg. Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor | Terlaksanaya pemeliharaan gedung kantor | 100% | 1 keg | 100% | 107.107.000 | 1 keg | 36.260.000 | 1 keg | 25.000.000 | 1 keg | 25.000.000 | 1 keg | 25.000.000 | 1 keg | 25.000.000 |
|  |  |  | Keg. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional | Terpeliharanya sarana kendaraan dinas | 100% | 12 bln | 100% | 49.120.000 | 12 bln | 49.724.000 | 12 bln | 50.000.000 | 12 bln | 50.000.000 | 12 bln | 50.000.000 | 12 bln | 50.000.000 |
|  |  |  | Keg.Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor | Terpeliharanya peralatan kerja | 100% | 12 bln | 100% | 10.000.000 | 12 bln | 10.930.000 | 12 bln | 20.000.000 | 12 bln | 25.000.000 | 12 bln | 30.000.000 | 12 bln | 35.000.000 |
|  |  |  | Keg. Pengadaan Mebelair | Tecukupinya mebelair perlengkapan kerja |  |  |  |  |  |  | 2 unit | 10.000.000 | 2 unit | 15.000.000 | 3 unit | 20.000.000 | 3 unit | 30.000.000 |
|  |  |  | Keg. Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor | Rehab Kantor KP3m |  |  |  |  |  |  | 1 keg | 750.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** |  |  |  |  | **4.000.000** |  | **4.000.000** |  | **16.000.000** |  | **8.000.000** |  | **8.000.000** |  | **308.000.000** |
|  |  |  | Keg. Survey IKM | *Terselenggaranya Self Assesment* |  |  |  |  |  |  | 1 keg | 10.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Keg. ISO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 keg | 300.000.000 |
|  |  |  | Keg. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu | Tersedianya pakain dinas khusus perizinan | 100% | 1 keg | 100% | 4.000.000 | 1 keg | 4.000.000 | 1 keg | 6.000.000 | 1 keg | 8.000.000 | 1 keg | 8.000.000 | 1 keg | 8000000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga atau calon investor dalam pengembangan investasi di daerah * Mengoptimalkan Profil investasi sebagai sarana utama daya jual kepada pihak ketiga atau calon investor | Meningkatnya investasi | **Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi** | **Besarnya promosi Peluang investasi dan keitraan dengan dunia usaha** | **3** | **3** | **2** |  | **5** |  | **5** |  | **7** |  | **7** |  | **7** |  |
|  |  |  |  | **Besaran investor pertahun** | **503** | **181∕684** | **181** |  | **190∕874** |  | **200∕1074** |  | **210∕1284** |  | **220∕1504** |  | **230∕1734** |  |
|  |  |  |  | **Laju investasi** | **19,172** | **11%** | **11%** |  | **19%** |  | **16%** |  | **14%** |  | **14%** |  | **14%** |  |
|  |  |  |  | **Nilai Investasi** | **123.457 m** | **85,692** | **85.692** |  | **160M** |  | **165M** |  | **170M** |  | **170M** |  | **170M** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **123.000.000** |  | **326.925.000** |  | **757.212.500** |  | **939.860.000** |  | **740.000.000** |  | **895.000.000** |
|  |  |  | Keg. Pengembangan Potensi Unggulan Daerah | Tersedianya profil kawasan investasi |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 keg | 25.000.000 | 1 keg | 25.000.000 | 1 keg | 30.000.000 |
|  |  |  | Keg. Penyelenggaraan Pameran Investasi | Terlaksananya promosi dan informasi investasi | 100% | 2 keg | 100% | 123.000.000 | 5 keg | 159.862.500 | 5 keg | 450.000.000 | 7 keg | 600.000.000 | 7 keg | 600.000.000 | 7 keg | 600.000.000 |
|  |  |  | keg.Monev dan Pelaporan | Terselenggaranya monev dan pelaporan |  |  |  |  |  |  | 1 keg | 10.000.000 | 1 keg | 20.000.000 | 1 keg | 20.000.000 | 1 keg | 35.000.000 |
|  |  |  | Keg. Penyelenggaraan Temu Usaha | Terselenggaranya fasilitasi kerjasama antara usaha besar dan UMKM |  |  |  |  | 1 keg | 12.212.500 | 1 keg | 12.212.500 | 1 keg | 50.000.000 | 1 keg | 50.000.000 | 1 keg | 60.000.000 |
|  |  |  | Keg. Penyusunan Profil Investasi | Tersedianya profil investasi |  |  |  |  | 1 keg | 154.850.000 |  |  | 1 keg | 154.860.000 |  |  | 1 keg | 150.000.000 |
|  |  |  | Keg. Kajian kebijakan PM | Terbitnya Raperda dan Reperbup Penanaman Modal |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 keg | 10.000.000 | 2 keg | 15.000.000 | 2 keg | 20.000.000 |
|  |  |  | Keg. Pengembangan Sistem Informasi PM di Daerah | Tersedianya website khusus penanaman modal |  |  |  |  |  |  | 1 keg | 75.000.000 | 1 keg | 50.000.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Keg. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bid. PM | Terselenggaranya sosialisasi kebijakan bid. PM |  |  |  |  |  |  | 1 keg | 30.000.000 | 1 keg | 30.000.000 | 1 keg | 30.000.000 |  |  |
|  |  |  | Keg. Penyusunan Cetak Biru (master plan) PM | Tersusunnya RUPM |  |  |  |  |  |  | 1 keg | 80.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Keg.Pengadaan SIM Perizinan | Penyusunan soiftware perizinan |  |  |  |  |  |  | 1 keg | 100.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Program Peningkatan Pelayanan Perizinan** | **Besaran pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal** | **17** | **32** | **100%** |  | **32** |  | **32** |  | **32** |  | **32** |  | **32** |  |
|  |  |  |  | **Cakupan jenis perizinan yang memiliki SPP /SOP** | **0%** | **25%** | **100%** |  | **75%** |  | **100%** |  | **100%** |  | **100%** |  | **100%** |  |
|  |  |  |  | **Persentase perijinan yang diterbitkan tepat waktu** | **95%** | **95%** | **100%** |  | **95%** |  | **95%** |  | **95%** |  | **95%** |  | **95%** |  |
|  |  |  |  | **Penerbitan IUJK dalam 6 hr kerja setelah [persyaratan lengkap** | **12 hr** | **12 hr** |  |  | **10 hr** |  | **9 hr** |  | **8 hr** |  | **7 hr** |  | **6 hr** |  |
|  |  |  |  | **Persentase pengaduan masyarakat** | **100%** | **100%** | **100%** |  | **100%** |  | **100%** |  | **100%** |  | **100%** |  | **100%** |  |
|  |  |  |  | **Besaran implementasi sistem pelayanan informasi dan perizinan informasi secara elektronik** | **0%** | **-** | **0%** |  | **100%** |  | **100%** |  | **100%** |  | **100%** |  | **100%** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **135.880.000** |  | **150.000.000** |  | **300.000.000** |  | **440.000.000** |  | **440.000.000** |  | **440.000.000** |
|  |  |  | Keg. Sistem Informasi Pelayanan Perizinan | Tersedianya booklet perizinan |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 keg | 50.000.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Keg.Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Terselenggaranya sosialisai peraturan perizinan |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 keg | 30.000.000 | 1 keg | 30.000.000 | 1 keg | 40.000.000 |
|  |  |  | Keg. Monev dan Pembinaan Kecamatan | Terselenggaranya monev PATEN |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 keg | 25.000.000 | 1 keg | 25.000.000 | 1 keg | 30.000.000 |
|  |  |  | Keg.Peningkatan Pelayanan Perizinan satu Pintu | Meningkatnya jumlah pemohon izin usaha | 100% | 3000 | 100% | 135.880.000 | 3300 | 150.000.000 | 3350 | 250.000.000 | 3400 | 275.000.000 | 3450 | 285.000.000 | 3500 | 290.000.000 |
|  |  |  | Keg. Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan | Terbitnya Raperda/Raperbub perizinan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 keg | 30.000.000 |  |  |
|  |  |  | Keg. Peningkatan Kualitas SDM guna peningkatan pelayanan perizinan | terselenggaranya pelatihan |  |  |  |  |  |  | 1 keg | 50.000.000 | 1 keg | 60.000.000 | 1 keg | 70.000.000 | 1 keg | 80.000.000 |
|  |  |  | **Program Penataan Peraturan Perundang-undangan** |  |  |  |  |  |  | **15.770.000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Keg. Review Perda | Terbitnya Raperda/Raperbub perizinan |  |  |  |  | 1 keg | 15.770.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Program Perencanaan Pembangunan Daerah** |  |  |  |  |  |  | **750.000** |  | **750.000** |  | **750.000** |  | **750.000** |  | **750.000** |
|  |  |  | Keg. Penyusunan Dokumen dan Pelaporan SKPD | Terselenggaranya penyusunan Renja, Lakip,PK,,LPPD dan dokumen internal SKPD |  |  |  |  | 4 keg | 750.000 | 4 Keg | 750.000 | 4 Keg | 750.000 | 4 keg | 750.000 | 4 keg | 750.000 |

**BAB VI**

**INDIKATOR KINERJA KP3M YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2013 – 2018**

Indikator kinerja KP3M kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018 yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai KP3M Kabupaten Temanggung pada tahun 2014 – 2018 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018 adalah sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

**Tabel 6.1**

INDIKATOR KINERJA KP3M

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | INDIKATOR SASARAN | | Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE - | | | | | Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD | |
| Tahun 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | (2) | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | |
| 1 | Cakupan jenis perizinan yang memiliki SPP/SOP | | 25 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu | 95 | | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 3 | Persentase penanganan pengaduan masyarakat | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Penerbitan IUJK dalam waktu 6 (enam ) hari kerja setelah persyaratan lengkap | 12 | | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 |
| 5 | Laju investasi | 11.167 | | 18.776 | 16.287 | 14.430 | 14.430 | 14.430 | 14.430 |
| 6 | Nilai Investasi | 85.692 M | | 160 M | 165 M | 170 M | 170 M | 170 M | 170 M |
| 7 | Besaran investor pertahun | 181 | | 190/874 | 200/1074 | 210/1284 | 220/1504 | 230/1734 | 230 |
| 8 | Besaran promosi peluang investasi dan kemitraan dengan dunia usaha | 2 | | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 9 | Besaran pelayanan perizinan dan non perizinan bid PM melalui PTSP dibid. PM | 17 | | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 10 | Besaran implementasi SPIPISE | 0 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**BAB VII**

**PENUTUP**

Demikian Rencana Strategis Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung untuk karun waktu 2014-2018 yang akan dijadikan pedoman atas pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Dengan demikian program dan kegiatan yang ada di Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung kedepan bisa dilaksanakan untuk memenuhi harapan pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan pelayanan kepada dunia usaha khususnya peanaman modal dan pelayanan perizinan.

|  |
| --- |
| Temanggung, 10 Maret 2014  KEPALA KANTOR  PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL  KABUPATEN TEMANGGUNG  **Dra.WARA ANDIJANI, M.Si**  NIP. 19611029 1999902 001 |

LAMPIRAN I

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif KP3M ( 2013 – 2018 )

Kabupaten Temanggung

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MISI | Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Daerah (Indikator Program) dan Indikator Kegiatan | Data Capaian pada Tahun 2012 | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
| 2013 (Sesuai APBD 2013) | | | 2014 (sesuai DPA 2014) | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
| target | prediksi capaian | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, tidak KKN dan berorientasi pada pelayanan publik |  | 1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan perizinan dan non perizinan | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran |  |  |  |  | **273.316.300** |  | **192.321.400** |  | **227.700.000** |  | **255.200.000** |  | **280.000.000** |  | **296.500.000** |
| Keg.Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA, Listrik dan Internet | Terbayarnya rekening telepon, air, listrik dan internet | 100% | 12 bln | 100% | 18.820.000 | 12 bln | 25.200.000 | 12 bln | 20.000.000 | 12 bln | 25.000.000 | 12 bln | 30.000.000 | 12 bln | 30.000.000 |
|  | Keg.Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | tersedianya alat kebersihan kantor | 100% | 12 bln | 100% | 5.000.000 | 12 bln | 5.265.500 | 12 bln | 6.000.000 | 12 bln | 7.000.000 | 12 bln | 8.000.000 | 12 bln | 8.000.000 |
| 2. Meningkatnya investasi | Keg.Penyediaan ATK | Tersedianya ATK | 100% | 12 bln | 100% | 11.569.300 | 12 bln | 11.341.900 | 12 bln | 17.000.000 | 12 bln | 18.000.000 | 12 bln | 19.000.000 | 12 bln | 20.000.000 |
|  | Keg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tercukupinya barang-barang cetakan | 100% | 12 bln | 100% | 136.102.500 | 12 bln | 57.973.600 | 12 bln | 70.000.000 | 12 bln | 70.000.000 | 12 bln | 75.000.000 | 12 bln | 75.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Keg. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | Tersedianya alat penerangan listrik | 100% | 12 bln | 100% | 2.000.000 | 12 bln | 2.161.000 | 12 bln | 3.500.000 | 12 bln | 4.000.000 | 12 bln | 4.500.000 | 12 bln | 5.000.000 |
|  |  |  | Keg. Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan | Tersedianya bahan bacaan | 100% | 12 bln | 100% | 1.800.000 | 12 bln | 1.800.000 | 12 bln | 2.000.000 | 12 bln | 2.000.000 | 12 bln | 2.500.000 | 12 bln | 2.500.000 |
|  |  | Keg. Penyediaan Makanan dan minuman | tercukupinya jamuan rapat dan minuman harian pegawai | 100% | 12 bln | 100% | 14.374.500 | 12 bn | 16.000.000 | 12 bln | 20.000.000 | 12 bln | 25.000.000 | 12 bln | 25.000.000 | 12 bln | 25.000.000 |
|  |  |  | Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah | Terfasiltasinya perjalanan dinas luar daerah | 100% | 12 bln | 100% | 56.650.000 | 12 bln | 38.320.000 | 12 bln | 40.000.000 | 12 bln | 45.000.000 | 12 bln | 50.000.000 | 12 bln | 55.000.000 |
|  |  |  | keg Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam daerah | Terfasilitasinya perjalanan dinas dalam daerah | 100% | 12 bln | 100% | 7.000.000 | 12 bln | 10.000.000 | 12 bln | 15.000.000 | 12 bln | 20.000.000 | 12 bln | 25.000.000 | 12 bln | 30.000.000 |
|  |  |  | Keg. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Tersedianya penjaga malam gedung kantor | 100% | 12 bln | 100% | 20.000.000 | 12 bln | 24.259.400 | 12 bln | 30.000.000 | 12 bln | 35.000.000 | 12 bln | 35.000.000 | 12 bln | 40.000.000 |
|  |  |  | Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya benda-benda pos |  |  |  |  |  |  | 12 bln | 1.800.000 | 12 bln | 1.800.000 | 12 bln | 2.400.000 | 12 bln | 2.400.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Keg. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kaerja | Tersedianya tenaga reparasi peralatan kantor |  |  |  |  |  |  | 12 bln | 2.400.000 | 12 bln | 2.400.000 | 12 bln | 3.600.000 | 12 bln | 3.600.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Program Peningatan Sarana Prasarana Aparatur** |  |  |  |  | **193.227.000** |  | **161.894.000** |  | **885.000.000** |  | **145.000.000** |  | **160.000.000** |  | **175.000.000** |
|  |  |  | Keg. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Tersedianya peralatan kerja | 100% | 4 unit | 100% | 27.000.000 | 2 unit | 64.980.000 | 3 unit | 30.000.000 | 4 unit | 30.000.000 | 4 unit | 35.000.000 | 4 unit | 35.000.000 |
|  |  |  | Keg. Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor | Terlaksanaya pemeliharaan gedung kantor | 100% | 1 keg | 100% | 107.107.000 | 1 keg | 36.260.000 | 1 keg | 25.000.000 | 1 keg | 25.000.000 | 1 keg | 25.000.000 | 1 keg | 25.000.000 |
|  |  |  | Keg. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional | Terpeliharanya sarana kendaraan dinas | 100% | 12 bln | 100% | 49.120.000 | 12 bln | 49.724.000 | 12 bln | 50.000.000 | 12 bln | 50.000.000 | 12 bln | 50.000.000 | 12 bln | 50.000.000 |
|  |  |  | Keg.Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor | Terpeliharanya peralatan kerja | 100% | 12 bln | 100% | 10.000.000 | 12 bln | 10.930.000 | 12 bln | 20.000.000 | 12 bln | 25.000.000 | 12 bln | 30.000.000 | 12 bln | 35.000.000 |
|  |  |  | Keg. Pengadaan Mebelair | Tecukupinya mebelair perlengkapan kerja |  |  |  |  |  |  | 2 unit | 10.000.000 | 2 unit | 15.000.000 | 3 unit | 20.000.000 | 3 unit | 30.000.000 |
|  |  |  | Keg. Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor | Rehab Kantor KP3m |  |  |  |  |  |  | 1 keg | 750.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** |  |  |  |  | **4.000.000** |  | **4.000.000** |  | **16.000.000** |  | **8.000.000** |  | **8.000.000** |  | **308.000.000** |
|  |  |  | Keg. Survey IKM | *Terselenggaranya Self Assesment* |  |  |  |  |  |  | 1 keg | 10.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Keg. ISO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 keg | 300.000.000 |
|  |  |  | Keg. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu | Tersedianya pakain dinas khusus perizinan | 100% | 1 keg | 100% | 4.000.000 | 1 keg | 4.000.000 | 1 keg | 6.000.000 | 1 keg | 8.000.000 | 1 keg | 8.000.000 | 1 keg | 8000000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi** | **Besarnya promosi Peluang investasi dan keitraan dengan dunia usaha** | **3** | **3** | **2** |  | **5** |  | **7** |  | **7** |  | **7** |  | **7** |  |
|  |  |  |  | **Besaran investor pertahun** | **503** | **181∕684** | **181** |  | **190∕874** |  | **200∕1074** |  | **210∕1284** |  | **220∕1504** |  | **230∕1734** |  |
|  |  |  |  | **Laju investasi** | **19,172** | **11%** | **11%** |  | **19%** |  | **16%** |  | **14%** |  | **14%** |  | **14%** |  |
|  |  |  |  | **Nilai Investasi** | **123.457 m** | **85,692** | **85.692** |  | **160M** |  | **165M** |  | **170M** |  | **170M** |  | **170M** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **123.000.000** |  | **326.925.000** |  | **757.212.500** |  | **939.860.000** |  | **740.000.000** |  | **895.000.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Keg. Pengembangan Potensi Unggulan Daerah | Tersedianya profil kawasan investasi |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 keg | 25.000.000 | 1 keg | 25.000.000 | 1 keg | 30.000.000 |
|  |  |  | Keg. Penyelenggaraan Pameran Investasi | Terlaksananya promosi dan informasi investasi | 100% | 2 keg | 100% | 123.000.000 | 5 keg | 159.862.500 | 5 keg | 450.000.000 | 7 keg | 600.000.000 | 7 keg | 600.000.000 | 7 keg | 600.000.000 |
|  |  |  | keg.Monev dan Pelaporan | Terselenggaranya monev dan pelaporan |  |  |  |  |  |  | 1 keg | 10.000.000 | 1 keg | 20.000.000 | 1 keg | 20.000.000 | 1 keg | 35.000.000 |
|  |  |  | Keg. Penyelenggaraan Temu Usaha | Terselenggaranya fasilitasi kerjasama antara usaha besar dan UMKM |  |  |  |  | 1 keg | 12.212.500 | 1 keg | 12.212.500 | 1 keg | 50.000.000 | 1 keg | 50.000.000 | 1 keg | 60.000.000 |
|  |  |  | Keg. Penyusunan Profil Investasi | Tersedianya profil investasi |  |  |  |  | 1 keg | 154.850.000 |  |  | 1 keg | 154.860.000 |  |  | 1 keg | 150.000.000 |
|  |  |  | Keg. Kajian kebijakan PM | Terbitnya Raperda dan Reperbup Penanaman Modal |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 keg | 10.000.000 | 2 keg | 15.000.000 | 2 keg | 20.000.000 |
|  |  |  | Keg. Pengembangan Sistem Informasi PM di Daerah | Tersedianya website khusus penanaman modal |  |  |  |  |  |  | 1 keg | 75.000.000 | 1 keg | 50.000.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Keg. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bid. PM | Terselenggaranya sosialisasi kebijakan bid. PM |  |  |  |  |  |  | 1 keg | 30.000.000 | 1 keg | 30.000.000 | 1 keg | 30.000.000 |  |  |
|  |  |  | Keg. Penyusunan Cetak Biru (master plan) PM | Tersusunnya RUPM |  |  |  |  |  |  | 1 keg | 80.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Keg.Pengadaan SIM Perizinan | Penyusunan soiftware perizinan |  |  |  |  |  |  | 1 keg | 100.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Program Peningkatan Pelayanan Perizinan** | **Besaran pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal** | **17** | **32** | **100%** |  | **32** |  | **32** |  | **32** |  | **32** |  | **32** |  |
|  |  |  |  | **Cakupan jenis perizinan yang memiliki SPP /SOP** | **0%** | **25%** | **100%** |  | **75%** |  | **100%** |  | **100%** |  | **100%** |  | **100%** |  |
|  |  |  |  | **Persentase perijinan yang diterbitkan tepat waktu** | **95%** | **95%** | **100%** |  | **95%** |  | **95%** |  | **95%** |  | **95%** |  | **95%** |  |
|  |  |  |  | **Penerbitan IUJK dalam 6 hr kerja setelah [persyaratan lengkap** | **12 hr** | **12 hr** |  |  | **10 hr** |  | **9 hr** |  | **8 hr** |  | **7 hr** |  | **6 hr** |  |
|  |  |  |  | **Persentase pengaduan masyarakat** | **100%** | **100%** | **100%** |  | **100%** |  | **100%** |  | **100%** |  | **100%** |  | **100%** |  |
|  |  |  |  | **Besaran implementasi sistem pelayanan informasi dan perizinan informasi secara elektronik** | **0%** | **-** | **0%** |  | **100%** |  | **100%** |  | **100%** |  | **100%** |  | **100%** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **135.880.000** |  | **150.000.000** |  | **300.000.000** |  | **440.000.000** |  | **440.000.000** |  | **440.000.000** |
|  |  |  | Keg. Sistem Informasi Pelayanan Perizinan | Tersedianya booklet perizinan |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 keg | 50.000.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Keg.Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Terselenggaranya sosialisai peraturan perizinan |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 keg | 30.000.000 | 1 keg | 30.000.000 | 1 keg | 40.000.000 |
|  |  |  | Keg. Monev dan Pembinaan Kecamatan | Terselenggaranya monev PATEN |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 keg | 25.000.000 | 1 keg | 25.000.000 | 1 keg | 30.000.000 |
|  |  |  | Keg.Peningkatan Pelayanan Perizinan satu Pintu | Meningkatnya jumlah pemohon izin usaha | 100% | 3000 | 100% | 135.880.000 | 3300 | 150.000.000 | 3350 | 250.000.000 | 3400 | 275.000.000 | 3450 | 285.000.000 | 3500 | 290.000.000 |
|  |  |  | Keg. Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan | Terbitnya Raperda/Raperbub perizinan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 keg | 30.000.000 |  |  |
|  |  |  | Keg. Peningkatan Kualitas SDM guna peningkatan pelayanan perizinan | terselenggaranya pelatihan |  |  |  |  |  |  | 1 keg | 50.000.000 | 1 keg | 60.000.000 | 1 keg | 70.000.000 | 1 keg | 80.000.000 |
|  |  |  | **Program Penataan Peraturan Perundang-undangan** |  |  |  |  |  |  | **15.770.000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Keg. Review Perda | Terbitnya Raperda/Raperbub perizinan |  |  |  |  | 1 keg | 15.770.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Program Perencanaan Pembangunan Daerah** |  |  |  |  |  |  | **750.000** |  | **750.000** |  | **750.000** |  | **750.000** |  | **750.000** |
|  |  |  | Keg. Penyusunan Dokumen dan Pelaporan SKPD | Terselenggaranya penyusunan Renja, Lakip,PK,,LPPD dan dokumen internal SKPD |  |  |  |  | 4 keg | 750.000 | 4 Keg | 750.000 | 4 Keg | 750.000 | 4 keg | 750.000 | 4 keg | 750.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

LAMPIRAN II

BERITA ACARA

HASIL KESEPAKATAN FORUM KP3M

PENYUSUNAN RENSTRA KP3M

KABUPATEN TEMANGGUNG

Pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014 sampai dengan hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 telah diselenggarakan forum penyusunan Renstra KP3M yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan :

1..Pemaparan materi :

1. VISI Kabupaten Temanggung dan VISI KP3M Kab Temanggung dan Isu Isu Strategis disampaiakan oleh Kepala KP3M Kab Temanggung ( Dra. Wara Andijani,M.Si)
2. Misi 6. Mewujudkan Pemerintahan yang bersih ,Transparan tidak KKN dan berorientasi pada Pelayanan Publik dan Misi KP3M disampaikan oleh Kasubag Tata Usaha Kab Temanggung ( Ridwan,BA )

2.. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum KP3M terhadap materi yang dipaparkan oleh Kepala ,Kasubag Tata Usaha dan para Kasi , sebagaimana diskusi telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok, maka pada :

Hari dan Tanggal : Rabu Tanggal 12 Maret 2014

Jam :08.00 WIB

Tempat :Aula KP3M Kab Temanggung

MENYEPAKATI

KESATU : Isu strategis ( pelayanan ) KP3M , tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan pelayanan rancangan renstra KP3M Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran berita acara ini.

KEDUA : Rencana program dan kegitan prioritas KP3M Kabupaten Temanggung Tahun 2014 - 2018 yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam lampiran berita acara ini.

KETIGA : Indikator kinerja KP3M yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran berita acara ini.

KEEMPAT : Hasil kesepakatan sidang – sidang kelompok forum KP3M Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara ini.

KELIMA : Berita acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan renstra KP3M Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 12 Maret 2014

Kepala KP3M

Selaku pimpinan sidang Forum KP3M

Dra.WARA ANDIJANI,M.Si

LAMPIRAN III : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM KP3M

NOMOR :

TANGGAL : 12 Maret 2014

Penyusun Renstra KP3M Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama | Lembaga / instansi | Jabatan / Alamat | Tanda Tangan |
| 1 | Dra.Wara Andijani, M.Si | KP3M | Kepala | 1. |
| 2 | Ridwan, BA | KP3M | Kasubag Tata Usaha | 2 |
| 3 | Arum Iswanto, SH | KP3M | Kasi Pengembangan PM | 3 |
| 4 | Ismudiyanto, SH.MM | KP3M | Kasi Pelayanan dan Verifikasi | 4 |
| 5 | Iin Widyastuti,SH | KP3M | Kasi P4 | 5 |
| 6 | Dhian Milasari | KP3M | Staf | 6 |
| 7 | Yopie Arie Iwantoro | KP3M | Staf | 7 |

Temanggung, 12 Maret 2014

Kepala KP3M

Selaku pimpinan sidang Forum KP3M

Dra.WARA ANDIJANI.M.Si

Daftar hadir Penyusun Renstra KP3M Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018

Tanggal : Maret 2014

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama | Lembaga / instansi | Jabatan / Alamat | Tanda Tangan |
| 1 | Dra.Wara Andijani, M.Si | KP3M | Kepala | 1. |
| 2 | Ridwan, BA | KP3M | Kasubag Tata Usaha | 2 |
| 3 | Arum Iswanto, SH | KP3M | Kasi Pengembangan PM | 3 |
| 4 | Ismudiyanto, SH.MM | KP3M | Kasi Pelayanan dan Verifikasi | 4 |
| 5 | Iin Widyastuti,SH | KP3M | Kasi P4 | 5 |
| 6 | Dhian Milasari | KP3M | Staf | 6 |
| 7 | Yopi Arie Iwantoro | KP3M | Staf | 7 |

Temanggung, Maret 2014

Kepala KP3M

Selaku pimpinan sidang Forum KP3M

Dra.WARA ANDIJANI.M.Si

Daftar Hadir Penyusun Renstra KP3M Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018

Tanggal : Januari 2014

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama | Lembaga / instansi | Jabatan / Alamat | Tanda Tangan |
| 1 | Dra.Wara Andijani, M.Si | KP3M | Kepala | 1. |
| 2 | Ridwan, BA | KP3M | Kasubag Tata Usaha | 2 |
| 3 | Arum Iswanto, SH | KP3M | Kasi Pengembangan PM | 3 |
| 4 | Ismudiyanto, SH.MM | KP3M | Kasi Pelayanan dan Verifikasi | 4 |
| 5 | Iin Widyastuti,SH | KP3M | Kasi P4 | 5 |
| 6 | Dhian Milasari | KP3M | Staf | 6 |
| 7 | Yopi Arie Iwantoro | KP3M | Staf | 7 |

Temanggung, Januari 2014

Kepala KP3M

Selaku pimpinan sidang Forum KP3M

Dra.WARA ANDIJANI.M.Si

Daftar hadir Penyusun Renstra KP3M Kabupaten Temanggung Tahun 2013 – 2018

Tanggal : Pebruari 2014

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama | Lembaga / instansi | Jabatan / Alamat | Tanda Tangan |
| 1 | Dra.Wara Andijani, M.Si | KP3M | Kepala | 1. |
| 2 | Ridwan, BA | KP3M | Kasubag Tata Usaha | 2 |
| 3 | Arum Iswanto, SH | KP3M | Kasi Pengembangan PM | 3 |
| 4 | Ismudiyanto, SH.MM | KP3M | Kasi Pelayanan dan Verifikasi | 4 |
| 5 | Iin Widyastuti,SH | KP3M | Kasi P4 | 5 |
| 6 | Dhian Milasari | KP3M | Staf | 6 |
| 7 | Yopi Arie Iwantoro | KP3M | Staf | 7 |

Temanggung, Pebruari 2014

Kepala KP3M

Selaku pimpinan sidang Forum KP3M

Dra.WARA ANDIJANI.M.Si

Daftar Hadir Penyusun Renstra P3M Kabupaten Temanggung Tahun 2013 – 2018

Tanggal : 12 Maret 2014

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama | Lembaga / instansi | | Jabatan / Alamat | Tanda Tangan | |
| 1 | Dra.Wara Andijani, M.Si | | KP3M | Kepala | | 1. |
| 2 | Ridwan, BA | | KP3M | Kasubag Tata Usaha | | 2 |
| 3 | Arum Iswanto, SH | | KP3M | Kasi Pengembangan PM | | 3 |
| 4 | Ismudiyanto, SH.MM | | KP3M | Kasi Pelayanan dan Verifikasi | | 4 |
| 5 | Iin Widyastuti,SH | | KP3M | Kasi P4 | | 5 |
| 6 | Dhian Milasari | | KP3M | Staf | | 6 |
| 7 | Yopi Arie Iwantoro | | KP3M | Staf | | 7 |

Temanggung, 12 Maret 2014

Kepala KP3M

Selaku pimpinan sidang Forum KP3M

Dra.WARA ANDIJANI.M.Si

LAMPIRAN IV : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM SKPD

NOMOR :

TANGGAL : 12 Maret 2014

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama | Lembaga / instansi | Jabatan / Alamat | Tanda Tangan | |
| 1 | Dra.Wara Andijani, M.Si | KP3M | Kepala | | 1. |
| 2 | Ridwan, BA | KP3M | Kasubag Tata Usaha | | 2 |
| 3 | Arum Iswanto, SH | KP3M | Kasi Pengembangan PM | | 3 |
| 4 | Ismudiyanto, SH.MM | KP3M | Kasi Pelayanan dan Verifikasi | | 4 |
| 5 | Iin Widyastuti,SH | KP3M | Kasi P4 | | 5 |
| 6 | Dhian Milasari | KP3M | Staf | | 6 |
| 7 | Yopi Arie Iwantoro | KP3M | Staf | | 7 |

Temanggung, 12 Maret 2014

Kepala KP3M

Selaku pimpinan sidang Forum KP3M

Dra.WARA ANDIJANI.M.Si

LAMPIRAN V :

BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM KOMUNIKASI KP3M

NOMOR :

TANGGAL : 12 Maret 2014

Rekapitulasi Hasil Pembahasan Kelompok Forum KP3M terhadap

Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Renstra KP3M Tahun 2013 – 2018

Kabupaten Temanggung

Tanggal : 12 Maret 2014

Tempat : Aula KP3M Kab Temanggung

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ISU STRATEGIS :   1. Mengembangkan kapasitas kelembagaan agar wewenang yang dimiliki semakin kuat 2. Menerapkan teknologi informasi (IT) untuk semua aspek pekerjaan 3. Mengembangkan kapasitas personil melalui pendidikan dan pelatihan terus menerus 4. Menumbuhkan kepercayaan pada masyarakat melalui sikap kerja yang profesional 5. Terus menerus meningkatkan kewibawaan personil dimata masyarakat melalui terciptanya tanggung jawab, bersih dan terbebas dari kesan KKN 6. Mengalokasikan anggaran yang lebih besar pada kegiatan-kegiatan priroritas yang memacu daya ungkit pereonomian seperti penanaman modal dan pelayanan perizinan 7. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang baik antar pengelola perizinan 8. Mengoptimalkan peran dari Profil Investasi sebagai pintu awal daya tarik investasi 9. Terus memperbaharui peraturan perundangan terkait penanaman modal dan pelayanan perizinan | | | |
| VISI : *Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang Bersih dan Transparan demi Meningkatnya Investasi* | | | |
| **Misi 1.** Meningkatkan pelayanan masyarakat yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
| * Meningkatkan kualitas kinerja aparat pelayanan yang bersih dan berwibawa serta mempunyai kesadaran dalam penegakan hukum | Meningkatnya kualitas dan kuantitas perizinan dan non perizinan | * Menciptakan suasana yang nyaman dalam proses pelayanan * Meningkatkan volume pendidikan dan pelatihan tentang perizinan dan penanaman modal * Meningkatkan sistem pemberian insentif bagi pegawai KP3M | * Meningkatkan kemampuan SDM yang semakin kompeten karena berkaitan dengan permasalahan permohonan izin yang semakin berkembang melalui pendidikan dan pelatihan serta sosialisasi peraturan perundangan-undangan * Memberikan insentif kepada pegawai KP3M * Membangun kantor yang representatif dan mengakomodasi pengaduan |
| **Misi 2.** Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berdasarkan standar dan prosedur pelayanan yang transparan dan memiliki kepastian hukum | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
| Meningkatkan koordinasi antar SKPD dalam rangka memberikan pelayanan perizinan dan penanaman modal yang mudah, transparan dan mempunyai kepastian hukum | Meningkatnya kualitas dan kuantitas perizinan dan non perizinan | * Membangun sistem koordinasi yang kuat antar SKPD pengelola perizinan agar pelayanan perizinan dan penanaman modal bisa lancar dan tepat waktu | * Mempersiapkan rumusan Peraturan Daerah dibidang perizinan melalui penyederhanaan dalam tahapan ijin * Meningkatkan kerjasama dan komitmen diantara para pemangku kebijakan (stake holders) perizinan , sehingga tidak ada keadaan yang menjadikan suatu ijin butuh waktu yang sangat lama dikarenakan tidak adanya satu komitmen bersama dalam rangka pertumbuhan dunia usaha bahwa mereka butuh kepastian waktu |
| **Misi 3.** Mendorong masuknya investor | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
| * Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga atau calon investor dalam pengembangan investasi di daerah * Mengoptimalkan Profil investasi sebagai sarana utama daya jual kepada pihak ketiga atau calon investor | Meningkatnya investasi di daerah | * Meningkatkan promosi potensi ekonomi dan investasi melalui event-event promosi baik tingkat daerah maupun nasional * Memudahkan akses masyarakat dalam mengurus perizinan penanaman modal * Bekerjasama dengan para pemangku kebijakan untuk berupaya membangun infrastruktur penyiapan investasi | * Menyiapkan rumusan seperangkat Peraturan Daerah yang memberikan peluang investasi, memberikan kemudahan dalam ijin dan keringanan dalam biaya agar investor lebih tertarik menanamkan modal atau usahanya di Kabupaten temanggung * Penataan Profil Investasi semakin dibutuhkan karena memudahkan investor dalam melihat peta potensi di wilayah-wilayah Kabupaten Temanggung sesuai Rencana Tata Ruang wilayah * Menyiapkan SDM dalam pengelolaan SPIPISE |